

Dampak Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat terhadap Pencapaian Minimum Essential Force (MEF) Tahap II

Andrew Figo Maulana Ervin

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: andrewervin69@gmail.com

ABSTRACT

With so many unwanted threats waiting to bring peril to anyone in the Asia-Pacific region, Indonesia is required to increase its defense capabilities to an ideal level, in order to be ready to face disputes that may have the potential to pose a threat not only to Indonesia's stability but also to the region or even the world. Therefore, a modernization program that aims to increase Indonesia's defense capability, called the Minimum Essential Force (MEF), was initiated in 2010, followed by predetermined stages that have been agreed upon by the Indonesian government. To complete all MEF stages, Indonesia must carry out various kinds of defense acquisitions, which can be done through bilateral cooperation. The United States, a country that is capable of producing advanced defense equipment, has become a strong partner for Indonesia and has contributed to the MEF program through many defense procurement contracts. During MEF phase II (2015–2019), the two countries reached many defense agreements in terms of military equipment. Therefore, through this research, the author will analyze the contribution of Indonesia-US defense cooperation in MEF phase II, which will lead to the improvement of Indonesia's defense capability.

Keywords: *Threats, Defense, Cooperation, MEF, Procurement*

Dengan banyaknya ancaman yang tidak diinginkan menunggu membawa bahaya bagi siapa pun di kawasan Asia-Pasifik, Indonesia dituntut untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya ke tingkat yang ideal, agar siap dalam menghadapi perselisihan yang berpotensi membawa ancaman tidak hanya kepada stabilitas Indonesia tetapi juga kepada kawasan atau bahkan dunia. Oleh karena itu, program modernisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia, yang disebut Minimum Essential Force (MEF), telah dimulai pada tahun 2010, diikuti dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan sebelumnya oleh pemerintah Indonesia. Untuk menyelesaikan semua tahapan MEF, Indonesia harus melakukan berbagai macam akuisisi pertahanan, yang dapat dilakukan melalui kerja sama bilateral. Amerika Serikat, negara yang mampu memproduksi alutsista canggih, telah menjadi mitra yang kuat bagi Indonesia dan telah berkontribusi pada program MEF melalui banyaknya kontrak pengadaan pertahanan yang dilakukan. Sepanjang MEF tahap II (2015–2019), kedua negara telah menyetujui banyak kesepakatan pertahanan dalam hal peralatan militer. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, penulis akan menganalisis kontribusi kerjasama pertahanan Indonesia-AS pada MEF tahap II, yang mana berdampak pada peningkatan kapabilitas pertahanan Indonesia.

Kata Kunci: *Ancaman, Pertahanan, Kerja Sama, MEF, Pengadaan*

Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang merupakan tempat tinggal bagi ribuan bahasa, budaya, dan ratusan juta manusia serta sumber daya alam yang melimpah, Indonesia mengemban tanggung jawab yang besar dalam memastikan dan menjamin keamanan negaranya dengan selalu siap dalam menghadapi berbagai macam potensi ancaman keamanan baik dari dalam maupun luar negeri. Terjaminnya keamanan negara

tentunya membutuhkan pertahanan negara yang kuat dan mampu menjalankan kewajibannya dalam mempertahankan kedaulatan negara. Akan tetapi, dengan kemampuan dan peralatan-peralatan pertahanannya yang terbatas, militer Indonesia berada pada posisi yang sulit dalam menjamin keamanan negara. Tentunya, sebuah revolusi melalui modernisasi dalam bidang pertahanan sangatlah diperlukan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan penting yang diperlukan oleh militer Indonesia. Dengan hal ini, sebuah program yang ditujukan untuk menjalankan modernisasi tersebut telah dirancang dan dijalankan oleh pemerintah Indonesia.

Seperti yang telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Penyelarasan *Minimum Essential Force* Komponen Utama, Minimum Essential Force (MEF) merupakan sebuah program yang ditujukan untuk mewujudkan kekuatan pokok minimum, yang mana merupakan bagian dari postur ideal pertahanan negara (Kemhan RI, 2012). Komponen utama yang dimaksud di dalam laporan tersebut adalah TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang terdiri dari tiga matra yakni TNI Angkatan Darat (AD), TNI Angkatan Laut (AL), dan TNI Angkatan Udara (AU), yang mana akan dimodernisasi melalui program MEF yang telah berjalan sejak tahun 2010, dan direncanakan akan rampung pada tahun 2024. Dalam program pencapaian standar pertahanan yang ideal tersebut, terdapat tiga tahapan yang mana masing-masing berjalan selama lima tahun dan memiliki target yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Pada MEF tahap I, target yang harus dipenuhi adalah sebesar 57,24%, lalu untuk MEF tahap II adalah sebesar 75,54%, dan yang terakhir MEF tahap III sebesar 100% (Zahara & M.N., 2020). Dengan adanya program pembangunan postur pertahanan tersebut, pemerintah Indonesia mengharapkan militer yang mampu dalam menghadapi berbagai macam ancaman dengan selalu siap melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagai wujud penangkal terhadap ancaman (Kemhan RI, 2012). Perlu diketahui bahwa pembangunan MEF dijalani melalui empat strategi pembangunan, yakni rematerialisasi, revitalisasi, relokasi, dan pengadaan (Kemhan RI, 2012). Tentunya dengan terselenggaranya pencapaian MEF melalui strategi-strategi tersebut, ancaman baik aktual maupun potensial akan mampu dan siap untuk dihadapi secara efektif oleh militer Indonesia.

Mengingat letak geografis Indonesia yang berada di kawasan Asia-Pasifik yang dipenuhi oleh ancaman-ancaman keamanan yang juga berpotensi merusak stabilitas kawasan, tentu dapat dimengerti mengapa meningkatkan keamanan sangat diperlukan oleh suatu negara yang berada dalam kawasan tersebut. Dalam hal ancaman, Kemhan RI telah menentukan apa saja yang dapat disebut sebagai ancaman terhadap keamanan negara. Jenis ancaman menurut Kemhan RI (2012) terbagi menjadi dua, yakni ancaman aktual dan potensial. Ancaman aktual meliputi ancaman-ancaman seperti, terorisme, separatisme, pelanggaran perbatasan wilayah, bencana alam, kegiatan-kegiatan ilegal, konflik horizontal, kelangkaan energi, dan *cyber crime*. Sedangkan ancaman potensial terdiri dari pemanasan global, beragam kegiatan ilegal di ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia), pencemaran lingkungan, pandemik, krisis finansial, agresi militer, dan kelangkaan air bersih dan pangan (Kemhan RI, 2012). Ancaman-ancaman tersebut telah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, yang mana wilayah-wilayah tersebut ditandai sebagai *flash point*, atau sebuah wilayah yang memiliki potensi ancaman yang tinggi (Kemhan RI, 2012).

Sebagaimana telah dijelaskan di dalam laporan Kebijakan Penyelarasan *Minimum Essential Force* Komponen Utama oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (2012) perlu untuk diketahui, bahwa tujuan dari dijalankannya program MEF ini tidak ditujukan dalam memicu terjadinya *arms race*, atau perlombaan senjata yang bertujuan untuk memenangkan perang total, melainkan ditujukan khusus untuk membangun kekuatan pertahanan negara ke standar yang lebih ideal dan mampu memberikan efek tangkal. Upaya terhadap pemenuhan target di setiap tahapan MEF, tentunya merupakan tanggung jawab

besar yang harus dijalani oleh pemerintah Indonesia. Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata) atau peralatan-peralatan pertahanan merupakan unsur terpenting dalam pencapaian target-target program MEF, yang mana telah menjadi fokus utama pemerintah Indonesia untuk didapat guna memenuhi pencapaian MEF. Di sepanjang berjalannya program MEF tersebut, peralatan-peralatan pertahanan yang telah diperoleh oleh militer Indonesia baik dari dalam maupun luar negeri tentu berdampak pada peningkatan target pencapaian MEF. Namun perlu diketahui juga, bahwa kemampuan industri pertahanan Indonesia dalam memenuhi permintaan pertahanan Indonesia yang tengah dimodernisasi sangatlah kecil, yang mana artinya tidak semua peralatan-peralatan pertahanan modern yang dibutuhkan oleh militer Indonesia mampu diproduksi dari dalam negeri (Zahara & M.N., 2020).

Oleh karena itu, untuk terus melanjutkan upayanya terhadap pencapaian target program MEF, pemerintah Indonesia tidak hanya akan mengandalkan pengadaan peralatan-peralatan pertahanan yang diproduksi dari dalam negeri, namun juga mengandalkan pengadaan produk peralatan pertahanan dari luar negeri yang mana mampu dalam memenuhi alutsista yang dibutuhkan oleh pertahanan Indonesia. Dalam hal pengadaan peralatan pertahanan dari luar negeri, pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan berbagai negara-negara di dunia seperti Australia, Belanda, Rusia, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Jerman, dan lain-lainnya. Namun ada pula salah satu negara yang memiliki kemajuan yang pesat dalam bidang pertahanan, serta memiliki sejarah kompleks dan penting dengan Indonesia yang tidak lain adalah Amerika Serikat (AS).

Sebagai negara pemasok persenjataan terbesar di dunia, AS tentunya memiliki kemampuan dalam menyediakan peralatan-peralatan pertahanan modern terhadap suatu negara yang masih belum mampu untuk memasoknya dari dalam negeri. Dengan modern dan terbuktinya keefektifan peralatan-peralatan pertahanan AS di dalam medan perang, tentu menciptakan daya tarik terhadap negara-negara yang tengah memodernisasi pertahanan negaranya dengan menjalin kerja sama pertahanan dengan AS. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berupaya memodernisasi pertahanannya, juga mengandalkan produk AS guna memenuhi peralatan-peralatan pertahanannya yang belum bisa dipenuhi dari dalam negeri. Namun perlu diketahui bahwa sebelum berjalannya program MEF tersebut, Indonesia dan AS juga telah menjalani hubungan kerja sama pertahanan selama lebih dari 70 tahun, yang mana sangat berdampak pada postur pertahanan negara Indonesia.

Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan AS dimulai pada akhir tahun 1949, setelah negara Indonesia berhasil mendapatkan kemerdekaan dari penjajah sebelumnya, yakni Kerajaan Belanda. Dan sejak saat itu, sejarah hubungan bilateral dalam bidang kerja sama pertahanan antara kedua negara tersebut beberapa kali sempat mengalami pasang surut di berbagai masa pemerintahan di Indonesia, mulai dari masa orde lama, orde baru, hingga masa reformasi.

Pada masa orde lama yang dipimpin oleh pemerintahan presiden pertama Indonesia, Sukarno, hubungan kerja sama pertahanan antara kedua negara tersebut diawali dengan hubungan yang baik, lebih tepatnya setelah presiden AS yang ke-33 Harry S. Truman mengkodifikasikan kedekatan posisi Indonesia terhadap AS, dengan memberikan selamat kepada Indonesia terhadap kemerdekaannya yang baru saja didapat (Truman, 1949). Dengan kemampuan pertahanan yang masih minim baik dari segi alutsista maupun profesionalitas, AS bersedia untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia melalui program bantuan keamanan guna memperkuat kemampuan pertahanan Indonesia yakni *Mutual Defence Assistance Act* (MSA) pada tahun 1950. Dana yang digelontorkan melalui program bantuan keamanan dari AS tersebut mencapai sekitar \$5 juta (Hutton, 2018). Seiring berjalannya waktu, hubungan kedua negara tersebut mulai melemah, dengan pemerintah Indonesia yang mulai mendekat ke arah blok timur, ditambah dengan intervensi

secara diam-diam dari pihak-pihak tertentu AS terhadap dunia perpolitikan Indonesia serta pengiriman bantuan terhadap kelompok-kelompok pemberontak di Indonesia.

Di bawah Pemerintahan Suharto yang mana menjadi simbol masa orde baru, hubungan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan AS terlihat berjalan dengan baik. Baiknya hubungan tersebut ditandai dengan dukungan AS terhadap Indonesia yang berencana untuk menginvasi dan menganeksasi Timor Timur pada tahun 1975. Dukungan tersebut tentunya meliputi kerja sama dalam bidang pertahanan terutama terkait pengadaan alutsista, di mana terhitung mulai tahun 1975 hingga 1985, total nilai dana yang dikeluarkan terkait jual-beli persenjataan antara Indonesia dan AS adalah sebesar \$1,119,9 miliar (Hartung & Washburn, 1997). Namun hingga pada tahun 1991, setelah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI (sekarang TNI) melakukan sebuah tindakan pelanggaran HAM terhadap warga sipil pada tahun 1991 di Santa Cruz, Dili, Timor Timur yang telah dianeksasi oleh pemerintah Indonesia, hubungan kerja sama militer antara Indonesia dan AS terlihat mulai melemah (Hartung & Washburn, 1997).

Memasuki masa reformasi pada tahun 1999, setelah mayoritas warga Timor Timur memilih untuk memisahkan diri melalui pemilihan referendum di bawah misi dewan PBB yakni UNAMET (United Nations Assistance Mission in East Timor), timbul sebuah ketidaksetujuan dari pihak militer Indonesia serta warga Timor Timur pro-Indonesia. Ketidaksetujuan tersebut dilampiaskan dengan kekerasan yang mana memakan ribuan korban jiwa dan kehancuran infrastruktur sebesar 70% (Morrissey, t.t.). Dengan banyaknya krisis kemanusiaan yang terjadi di Indonesia pada saat itu, pemerintah AS mendapatkan banyak tekanan baik dari dalam maupun luar negeri serta PBB, yang mana membuat Amerika Serikat pada akhirnya memilih untuk memotong hubungan kerja samanya terutama dalam kerja sama militer dengan Indonesia untuk sementara waktu. Hal ini tentu memiliki dampak yang sangat buruk terhadap kemampuan militer Indonesia, dengan persenjataan-persenjataannya yang mayoritas didapat dari AS tidak dapat bekerja secara efektif dikarenakan kurangnya suku cadang (Kusumadewi & Armenia, 2016). Selama hampir satu dekade, dengan aktifitas hubungan kerja sama militernya yang minim, normalisasi hubungan kerja sama terutama di bidang militer antara Indonesia dengan Amerika Serikat mulai terlihat kembali.

Normalisasi hubungan kerja sama kedua negara tersebut didorong oleh perubahan-perubahan terkait sistem pemerintahan Indonesia ke arah yang lebih demokratis, dan juga ancaman-ancaman keamanan yang semakin meningkat di abad ke-21, terutama ancaman terorisme. Ancaman tersebut menjadi salah satu penyebab pendorong normalisasi hubungan kerja sama antara Indonesia dan AS. Pemerintah AS di bawah pemerintahan Presiden George W. Bush melihat bahwa Indonesia memiliki potensi rentan terhadap ancaman terorisme, yang mana tentunya tidak hanya akan berdampak pada Indonesia saja namun juga seluruh dunia. Selain itu, Pemerintahan Bush juga berargumen bahwa mengisolasi Indonesia yang telah terkena serangan-serangan teroris, bukanlah bagian dari agenda pemerintahannya (Fox News, 2015). Oleh karena itu, dengan kedua negara memiliki kepentingan yang sama dalam membrantas terorisme, peluang terhadap pengembalian hubungan kerja sama yang telah membeku sejak tahun 1999 terlihat sangat memungkinkan. Namun mengembalikan kerja sama penuh dengan Amerika Serikat membutuhkan kesepahaman dan komitmen yang kuat, diikuti dengan beberapa syarat yang harus dijalankan oleh pemerintah dan militer Indonesia agar tidak melakukan kesalahan yang dapat memicu terjadinya krisis kemanusiaan.

Pada tahun 2005, melihat negara Indonesia mulai memiliki pemerintahan yang lebih demokratis, sanksi AS terhadap Indonesia secara perlahan mulai dilonggarkan. Salah satunya dengan saling melakukan kerja sama, setelah membekukannya hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut. Sejak AS mencabut embargo militernya secara

penuh terhadap Indonesia pada tahun 2006, kerja sama pertahanan antara Indonesia dan AS terus meningkat baik dari segi jumlah kegiatan, ruang lingkup kerja sama, maupun tingkat keterlibatannya. Hal ini dilakukan dengan tujuan normalisasi hubungan kerja sama antara Amerika Serikat dan Indonesia, terutama dalam bidang pertahanan. Sebagai gambaran, pada tahun 2011-2016, setidaknya ada 998 kegiatan pertahanan dan keamanan bersama yang dilakukan oleh pejabat militer Indonesia dan AS (Kemlu RI, t.t.).

Tentunya beberapa dari kerja sama tersebut juga meliputi kerja sama terkait akuisisi alutsista, yang mana pemerintah Indonesia memiliki ketertarikan dalam memperoleh alutsista dari AS guna kepentingan pemenuhan program MEF-nya. Perlu diketahui bahwa dalam melakukan akuisisi alutsista dari AS, negara asing harus melalui skema atau program milik lembaga kerja sama pertahanan AS, yakni Defense Security Cooperation Agency (DSCA) yang dibawah oleh Departemen Pertahanan AS, atau Dephan AS (DoD). Terdapat beberapa program yang telah dilalui pemerintah Indonesia, yakni FMS dan EDA. Melalui program FMS (Foreign Military Sales), negara asing dapat melakukan pengadaan yang dilakukan secara G2G atau *government-to-government*, yang mana pengadaan yang dilakukan dapat berupa pelatihan militer, jasa militer, dan tentunya pengadaan peralatan-peralatan pertahanan (DASA, t.t.). Selanjutnya yakni EDA (Excess Defense Articles), yang mana dengan program ini negara asing yang dianggap sebagai mitra oleh AS dapat memperoleh artikel pertahanan atau alutsista melalui hibah atau penjualan dengan harga yang murah (DSCA, t.t.). Melalui skema atau program yang disediakan oleh DSCA tersebut, pemerintah Indonesia dapat melakukan akuisisi peralatan-peralatan pertahanan yang diminati.

Adanya program MEF, memberikan kesempatan kepada pemerintah Indonesia dalam membangun kembali kemampuan pertahanannya yang sempat melemah akibat dibekukannya hubungan kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara lain terutama AS. Dengan hubungan kerja sama yang kembali berjalan dengan normal, pemerintah Indonesia dapat melakukan berbagai macam pengadaan guna kepentingan pencapaian program MEF-nya. Sepanjang pencapaian MEF terakhir yang telah terselesaikan yakni MEF tahap II mulai dari tahun 2015 hingga 2019, pemerintah Indonesia telah menerima sejumlah peralatan-peralatan pertahanan yang telah dilakukan melalui persetujuan pengadaan antara Indonesia dan AS. Alutsista berat yang didapat seperti jet tempur F-16 C/D Block 52ID dan helikopter tempur AH-64E Apache Guardian beserta dengan persenjataan dan teknologi avionik, serta kemampuan-kemampuan teknis yang terkandung di dalamnya, tentu sangat berdampak pada modernisasi pertahanan Indonesia yang telah dicapai dalam MEF tahap II. Dengan hal tersebut, peningkatan yang diperoleh berkat dari berbagai macamnya pengadaan peralatan-peralatan persenjataan sangat berdampak pada peningkatan pencapaian MEF tahap II, yang mana semula berada di angka 57,24% pada MEF tahap I, meningkat menjadi 63,19%.

Metode Penelitian

Dalam studi kasus Dampak Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Amerika Serikat Terhadap Pencapaian MEF Tahap II ini, tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah eksplanatif. Tipe penelitian tersebut digunakan untuk mencari alasan terkait sebab-akibat suatu fenomena. Adanya fenomena tersebut memberikan penulis sebuah gambaran umum yang mana selanjutnya akan diujikan dengan teori atau konsep tertentu. Jangkauan penelitian yang digunakan oleh penulis dimulai dari tahun pertama dimulainya MEF tahap II yakni tahun 2015 hingga berakhir pada tahun 2019. Di sepanjang lima tahun tersebut, Indonesia dan AS telah bekerja sama dan berhasil mendatangkan peralatan-peralatan pertahanan yang dibutuhkan oleh pertahanan Indonesia, yang juga tentunya berdampak pada pencapaian MEF tahap II. Selain itu, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh

penulis adalah studi literatur, yang dilakukan dengan menelusuri data-data yang bersifat sekunder dan telah diteliti oleh penulis-penulis sebelumnya.

Landasan Teori

Neorealisme

Memastikan terjaminnya keamanan terhadap suatu negara, telah menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap negara di dunia apabila ingin bertahan di dalam sistem internasional yang tidak mengenal otoritas terpusat ini. Sebagaimana telah diungkapkan oleh Kenneth Waltz, “*In anarchy, security is the highest end. Only if survival is assured can states seek such other goals as tranquility, profit, and power.*” (Baldwin, 1997). Inti dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keamanan negara merupakan suatu hal yang diprioritaskan dan harus dipenuhi demi terjaminnya keberlangsungan hidup suatu negara. Dengan terjaminnya hal tersebut, selanjutnya suatu negara dapat dilanjutkan dengan memenuhi agenda atau kepentingan nasional lainnya yang ingin dicapai. Turun dari pemikiran realisme klasik, *structural realism*, atau biasa disebut dengan neorealisme merupakan teori hubungan internasional yang dapat mengartikan lebih dalam, terhadap motivasi suatu negara dalam meningkatkan keamanannya (Baldwin, 1997). Tentunya keamanan merupakan suatu hal yang harus dipenuhi melalui kekuatan pertahanan dari negara. Dan jenis-jenis kekuatan di dalam perspektif neorealisme terbagi menjadi dua yakni, *defensive realism* dan *offensive realism*.

Terkait pengertian *offensive realism*, menurut pencetusnya yakni John J. Mearsheimer melihat bahwa tujuan setiap negara di dunia adalah dengan mendorong kekuatan negaranya ke arah yang maksimal atau *power maximizers* dengan mengutamakan hegemoni (Toft, 2005). Namun berbeda dengan *defensive realism* yang dicetuskan pertama oleh Kenneth Waltz, di mana negara-negara akan lebih berupaya dalam menjadi *security maximizers* yang artinya negara akan enggan dalam memperluas hegemoninya dan memilih untuk memaksimalkan keamanannya guna terciptanya *balance of power*. Hal tersebut dilakukan dengan cara negara tidak akan melampaui standar kekuatan pertahanannya yang ideal dan hanya perlu memastikan terjaminnya keamanan negara (Steinsson, 2014).

Revolution in Military Affairs (RMA)

RMA atau *Revolution in Military Affairs* memiliki dampak yang besar terhadap terbentuknya organisasi pertahanan yang lebih maju dan modern, yang mana dituntut untuk mampu beradaptasi dengan peperangan modern. Awal mula perdebatan terkait apa itu RMA bermula pada tahun 1991, di mana operasi militer AS, yakni Operation Desert Storm mengalami kesuksesan dalam menaklukkan militer Iraq di Perang Teluk (Cuoco, 2010). Kemenangan AS tersebut tidak hanya disebabkan dengan strategi atau profesionalitas militer saja, namun lebih utamanya disebabkan oleh teknologi modern yang diadaptasikan ke dalam organisasi pertahanan AS, yang mana merupakan kelebihan yang tidak dimiliki oleh musuh. Dalam tulisan Cuoco (2010), adanya kelebihan teknologi tersebut menarik perhatian banyak peneliti atau ilmuwan, dengan ditandai berbagai macam peralatan-peralatan pertahanan AS yang didemonstrasikan saat menjalankan operasi militer di Perang Teluk, seperti penggunaan PGM (Precision-Guided Munitions), pesawat siluman, dan teknologi sensor. Tentu hal tersebut memicu sebuah perdebatan baru terkait RMA.

Upaya dalam memodernisasi pertahanan negara meliputi modernisasi terhadap berbagai aspek mendasar seperti teknologi, strategi, organisasi, dan lain-lainnya. Namun dalam melakukan modernisasi pertahanan, teknologi menjadi kunci terpenting yang harus dipenuhi. Berdasarkan pengertian Andrew Krepinevich, RMA merupakan pengadaptasian antara teknologi pertahanan yang modern, dengan organisasi-organisasi dalam militer yang

telah tersedia beserta konsep operasional terbarunya (Cuoco, 2010). Pengertian terhadap RMA tersebut tidak hanya disetujui oleh Krepinevich saja, namun juga peneliti-peneliti lainnya, sebagaimana telah disimpulkan oleh Richard O. Hundley, terdapat banyak peneliti yang juga berpandangan bahwa kunci kesuksesan dalam peperangan modern adalah dengan menggabungkan teknologi C3I (Command, Control, Communications, and Intelligence) dan PGM dengan konsep operasional terbaru, di mana hal tersebut ditujukan agar dapat beradaptasi dengan konsep peperangan modern (Hundley, 1999).

Akan tetapi, seperti yang diketahui tentu tidak semua negara di dunia memiliki kemampuan dalam membangun atau mengoperasikan teknologi-teknologi yang terkandung dalam RMA tersebut. Dengan dituntut untuk memiliki peralatan-peralatan pertahanan yang lebih modern demi beradaptasi di dalam era peperangan modern, banyak negara yang beralih dengan melakukan kontrak pengadaan dari luar negeri. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Michael Raska (2011), di mana peran RMA sudah dapat dikatakan cukup dalam melaksanakan upaya modernisasi pertahanan suatu negara dengan melakukan akuisisi terhadap teknologi-teknologi pertahanan modern, yang mana tentunya dapat diperoleh baik melalui impor maupun dibangun dari dalam negeri.

Melihat banyaknya modernisasi yang harus dipenuhi dan dimiliki oleh militer suatu negara, tentu mengingatkan kembali bahwa alasan terjadinya RMA tersebut tentunya memiliki faktor penyebab atau pendorong. Seperti yang disebutkan oleh Emily O. Goldman, sejatinya terdapat empat faktor pendorong dalam mengimplementasikan RMA terhadap militer suatu negara, yakni keamanan, ekonomi politik, teknologi, dan institusional (Handaka et al, 2021). Setiap faktor pendorong tersebut masing-masing dapat diartikan, yang artinya; pada faktor keamanan, suatu negara akan berusaha menjaga keamanannya dengan selalu meningkatkan kemampuan pertahanannya yang dapat dilakukan dengan mengimplementasikan RMA; selanjutnya yakni faktor ekonomi politik, yang mana mendorong terjadinya RMA dengan adanya kerja sama antara pihak pemerintah suatu negara dengan pihak industri-industri pertahanan memiliki kesepahaman dalam menjalin kontrak kerja sama yang saling menguntungkan, alhasil juga berkontribusi terhadap perekonomian negara bahkan dunia; faktor teknologi juga menjadi pendorong, dengan konsep peperangan yang terus berubah-ubah di setiap masanya atau dengan kata lain semakin modern, tentu diikuti dengan perkembangan teknologi pertahanan yang semakin dibutuhkan oleh banyak negara, yang mana dapat disediakan oleh sektor industri pertahanan; dan yang terakhir faktor institusional, sebagai faktor yang penting dalam berjalannya RMA, di mana suatu upaya dalam memodernisasi sebuah organisasi pertahanan pada akhirnya tidak luput dari peran politik yang bertanggung jawab atas memberikan keputusan (Handaka et al, 2021).

Military-Industrial Complex (MIC)

Sebagaimana pertama kalinya diperkenalkan dan disebutkan oleh presiden AS yang ke-34, yakni Presiden Dwight D. Eisenhower melalui pidato terakhirnya sebagai presiden,

"[The] conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience...[W]e must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes." (Dunlap Jr., 2011)

Military-Industrial Complex atau biasa disebut dengan MIC, seperti yang telah disampaikan oleh Presiden Eisenhower di atas memiliki pengaruh yang kuat dalam memicu terjadinya peperangan, dengan adanya ambisi dari para pemegang keputusan yang berambisi ingin menguntungkan dirinya sendiri (Dunlap Jr., 2011). Namun di sisi lain secara garis besar, MIC memiliki peran yang besar dalam mendorong hubungan antara hubungan kerja sama

antara pemerintah serta militernya dengan industri-industri pertahanan, guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh suatu negara yang tengah berupaya dalam memodernisasi angkatan bersenjata. Oleh karena itu terdapat banyak ilmuwan sosial yang berpandangan bahwa MIC merupakan sebuah koalisi kepentingan yang terdiri dari pihak industri pertahanan dan pemerintah suatu negara yang mana masing-masing dari pihak-pihak tersebut memiliki agenda atau kepentingan pribadinya sendiri. Gabungan antara kepentingan-kepentingan dari beberapa pihak tersebut juga tentunya memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam suatu pemerintahan, yang mana terkadang belum tentu dilakukan dengan dalih kepentingan nasional (Dunne & Skons, 2010).

Oleh karena itu di dalam dunia perpolitikan AS, pihak-pihak yang tergabung dalam proses hubungan kerja sama pertahanan tersebut terkadang disebut dengan “iron triangle”, yang mana terdapat berbagai pihak atau aktor yang saling memberikan kontribusi dalam bidang politik, persetujuan dari pemegang keputusan terkait pengeluaran militer, dipermudahnya birokrasi melalui lobi, dan adanya pengawasan terhadap sektor industri (Nzeribe & Imam, 2018). Di dalam perpolitikan AS, menurut Nzeribe dan Imam (2018), proses yang harus dilalui dalam MIC tentunya akan ditemui oleh berbagai macam pihak yang memiliki sumber daya serta berperan dalam menengahi proses berjalannya MIC, yang di antaranya yakni: perusahaan dan lembaga kontraktor pertahanan, kontraktor pertahanan swasta, Pentagon, Kongres AS, dan cabang Eksekutif AS. Pihak-pihak tersebut tentu memiliki perannya masing-masing dalam mewujudkan keberhasilan suatu pengadaan dalam bidang militer.

Pihak-pihak yang telah disebutkan di atas masing-masing memiliki peran yang besar dalam menghadirkan kontrak-kontrak pengadaan peralatan-peralatan pertahanan. Namun perlu diketahui bahwa konsep peperangan yang semakin modern, telah mendorong banyak industri pertahanan untuk terus berinovasi dengan terus menghadirkan peralatan-peralatan pertahanan yang baru dan efektif di dalam medan pertempuran.

Tentunya hal tersebut juga menjadi pemicu terhadap semakin banyaknya negara yang menginginkan peralatan-peralatan pertahanan modern akibat meningkatnya kemajuan teknologi dalam bidang pertahanan. Dengan hal tersebut, seperti yang diketahui RMA tentu dapat menjadi salah satu alasan munculnya MIC. Sebagaimana dijelaskan oleh Dunne dan Skons (2010), terdapat perubahan permintaan dalam pasar persenjataan di mana RMA memiliki peran terhadap perubahan tersebut, dengan membuat teknologi komunikasi dan kontrol yang mana juga terkandung dalam RMA, menjadi sangat penting dan dibutuhkan dalam sebuah operasi militer di zaman peperangan modern ini.

Pembahasan

Hasil Kerja Sama Pertahanan Indonesia-AS di Sepanjang MEF II

Program modernisasi berupa program MEF yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia, tentu memiliki dampak terhadap peningkatan kekuatan serta modernisasi terhadap pertahanan negara Indonesia. Akan tetapi, perlu diingat kembali, bahwa sejatinya program MEF ini tidak semata-mata ditujukan untuk memicu ambisi Indonesia dalam menjadi negara yang berambisi memperluas hegemoninya, melainkan sebaliknya. Sebagai negara yang mengutamakan keamanan dan mengedepankan netralitas serta kedamaian, program MEF dapat dikatakan cukup menuntun pertahanan negara Indonesia ke arah yang lebih kuat dalam menjamin terciptanya keamanan, selama terus berpedoman pada standar kekuatan yang telah disetujui oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut, memberikan gambaran bahwa Indonesia tengah memaksimalkan keamanannya melalui sebuah program modernisasi pertahanan, dan tidak mencari kesempatan dalam melakukan ekspansi atau agresi di dalam kawasannya.

Terhitung hingga akhir MEF tahap II, pencapaian aspek fisik dalam bidang alutsista yang telah tercapai adalah sebesar 63,19% (Kemenko Polhukam RI, 2019). Apabila dibagi menjadi tiga matra, persentase pencapaian yang dicapai oleh setiap matra mulai dari AD adalah sebesar 76,82%, sedangkan dari AL sebesar 67,57%, dan yang terakhir dari AU adalah sebesar 45,19% (Kemenko Polhukam RI, 2019). Dengan tercapainya peningkatan terhadap program pencapaian standar kekuatan tersebut, pemerintah Indonesia seperti yang diketahui selanjutnya dapat mengarahkan kekuatan-kekuatan militernya ke arah *flash point*, atau titik wilayah yang memiliki ancaman berpotensi, yang mana telah menjadi dasar tujuan dijalkannya program modernisasi tersebut.

Akan tetapi, tercapai dan terselesaikannya MEF tahap II tentunya tidak luput dari adanya kerja sama pertahanan antara Indonesia dan negara-negara mitra lainnya yang telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia melalui proses yang panjang dalam melakukan pengadaan alutsista, yang mana membantu terjadinya peningkatan terhadap titik pencapaian target program modernisasi tersebut. Salah satu mitra Indonesia yang berdampak dalam pencapaian MEF tahap II yakni AS, telah menunjukkan kontribusinya melalui persetujuan-persetujuan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak demi terciptanya pengadaan peralatan-peralatan pertahanan yang dibutuhkan oleh Indonesia. Hasil-hasil kerja sama yang didapat dari kedua negara tersebut tentu memiliki dampak besar yang berkontribusi dalam pencapaian target pengadaan alutsista dalam sepanjang program MEF tahap II. Tentu, dilakukannya pengadaan-pengadaan tersebut harus melalui berbagai macam proses, guna tercapainya sebuah pengadaan.

Dapat diketahui di sepanjang berjalannya MEF tahap II, terdapat peningkatan hubungan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan AS. Hal tersebut dapat ditandai dengan dilakukannya sebuah persetujuan kerja sama dalam bidang pertahanan pada tahun 2010 antara kedua negara tersebut, yang kemudian disempurnakan dalam sebuah joint statement tepat pada tahun 2015 (Kemhan RI, 2015). Berawal dari kunjungan presiden AS yang ke-44, yakni Barack Obama di Jakarta pada tahun 2010 sembari menemui presiden Indonesia yang ke-6, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam kunjungan tersebut, kedua presiden mengeluarkan sebuah kesepakatan berupa *US-Indonesia Comprehensive Partnership* yang ditujukan untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara yang sempat melemah pada masa embargo terhadap Indonesia. Kemudian pada tahun 2015 kedua negara kembali, di mana kali ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang baru dilantik bertemu dengan Presiden Obama. Dalam pertemuan tersebut, terdapat empat MoU (Memorandum of Understanding) agenda kerja sama, yang mana salah satunya meliputi kerja sama pertahanan.

Dalam bidang pertahanan, sebuah *joint statement* telah ditandatangani yang mana di dalam perjanjian tersebut berisikan berbagai macam cakupan kerja sama, seperti kerja sama dalam bidang maritim, pengadaan yang disertai R&D (Research and Development), peningkatan profesionalitas, kerja sama operasi perdamaian yang disertai pelatihan, kerja sama humaniter, dan mitigasi terhadap ancaman transnasional (Kemlu RI, t.t.). Tujuan dari perjanjian kerja sama pertahanan tersebut adalah untuk memperkuat hubungan kerja sama antara Indonesia dan AS yang dapat mendatangkan berbagai hasil, yang mana tentunya pengadaan alutsista menjadi salah satu bidang yang difokuskan (Parameswaran, 2015).

Seperti yang diketahui, dalam melakukan akuisisi alutsista dari AS, terdapat beberapa program kerja sama di bawah lembaga kerja sama antar-negara dalam bidang pertahanan yang harus dilalui oleh pemerintah Indonesia, yakni DSCA yang mana dibawah oleh Dephan AS. Program-program seperti FMS dan EDA menjadi kunci untuk Indonesia dalam mendapatkan alutsista. Di dalam proses kerja sama antara kedua negara tersebut yang mana harus dilalui oleh berbagai macam skema, telah terdapat beberapa kontrak pengadaan peralatan-peralatan pertahanan yang meliputi 24 pesawat F-16 C/D Block 52ID dan 8

helikopter serang AH-64E Apache Guardian, beserta dengan berbagai macam peralatan pendukung dan persenjataannya.

Dilakukannya akuisisi jet tempur oleh pemerintah Indonesia bermula pada saat AS mengumumkan untuk menghibahkan sebanyak 24 jet tempur F-16 Block 25 milik AU-nya yang mana tentunya dilakukan melalui program EDA. Namun, menurut The White House Office of the Press Secretary (2011), pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk meningkatkan dan meregenerasi kemampuan 24 jet tempur F-16 Block 25 yang telah dihibahkan tersebut. Oleh karena itu pada tahun 2012 pemerintah Indonesia menandatangani kontrak *upgrade* terhadap 24 jet tempur F-16 Block 25 melalui proyek bernama "Peace Bima Sena II" yang dijalankan melalui program FMS (TNI-AU, 2014). Menurut DSCA (2011), biaya kontrak *upgrade* jet tempur tersebut diperkirakan sebesar \$750 juta, yang mana mencakupi dukungan terhadap suku cadang, logistik, pelatihan, dan tentunya *upgrade* terhadap 24 jet tempur tersebut. Proses dalam mendapatkan alutsista tersebut, berawal dari Komisi I DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI menyetujui penerimaan hibah 24 jet tempur F-16 Block 25 dari AS pada Oktober, 2011 (TNI-AU, 2014). Namun seperti yang diketahui, pemerintah Indonesia menginginkan jet tempur yang dihibahkan untuk ditingkatkan kemampuannya. Oleh karena itu terkait *upgrade* 24 jet tempur F-16 Block 25 tersebut, pemerintah dari kedua negara tepatnya Kemhan RI dan Dephan AS saling bekerja sama dalam mendapatkan LOA (Letter of Offer and Acceptance) (TNI-AU, 2014). Kontrak *upgrade* di bawah program FMS tersebut pada akhirnya tentu disetujui oleh Kongres AS (DSCA, 2011). Selanjutnya kontrak tersebut tentunya akan diteruskan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan kontrak *upgrade*.

Dalam kontrak *upgrade* tersebut, terdapat berbagai pihak yang turut berpartisipasi dalam melakukan modernisasi terhadap 24 jet tempur F-16 tersebut. menurut DSCA (2011), pihak-pihak yang terlibat adalah perusahaan dirgantara di AS bernama Pratt & Whitney dan salah satu unit pemeliharaan milik USAF (United States Air Force) atau AU AS yang bernama 309th Maintenance Wing. Melalui *upgrade*, semua 24 jet tempur F-16 Block 25 yang telah dihibahkan tersebut telah ditingkatkan menjadi F-16 Block C/D 52ID, yang mana kemampuan yang dimiliki oleh jet tempur F-16 tersebut sejajar dengan F-16 Block 52 pada umumnya, dengan keunggulan yang terdapat pada bagian kemampuan tempur, sistem avionik, serta persenjataan-persenjataannya (TNI-AU, 2014). Akan tetapi terkait persenjataan untuk jet tempur F-16 tersebut, perlu diketahui kontrak pengadaannya dilakukan secara terpisah, di mana terdapat dua kontrak pengadaan rudal (peluru kendali) berupa AIM-9 Sidewinder dan AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile), yang masing-masingnya merupakan dua jenis rudal yang berbeda.

Kedua persenjataan bersifat PGM tersebut memiliki kesamaan berupa rudal pertempuran udara, namun juga memiliki perbedaan di mana AIM-9 Sidewinder merupakan rudal jarak pendek sedangkan AIM-120 AMRAAM merupakan rudal jarak sedang (TNI-AU, 2014). Proses yang dilalui untuk mendapatkan sebanyak 30 unit AIM-9 Sidewinder dimulai pada Mei, 2015, dengan telah diberikannya sebuah permintaan terkait pembelian rudal kepada Departemen Luar Negeri AS atau Deplu AS (DoS) oleh pemerintah Indonesia, yang mana kemudian Deplu AS melanjutkan permintaan tersebut kepada DSCA untuk segera diproses dan diberikan kepada Kongres AS untuk disetujui (DSCA, 2015). Kontrak pengadaan rudal bernilai sebesar \$47 juta tersebut tentu selanjutnya segera ditujukan kepada kontraktor pertahanan. Menurut DSCA (2015) dalam pengadaan rudal AIM-9 Sidewinder tersebut, kontraktor pertahanan yang bertanggung jawab adalah Raytheon Missile Systems Company. Selain pengadaan rudal AIM-9 Sidewinder, terdapat pengadaan rudal lain yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yakni AIM-120 AMRAAM yang mana dilakukan pada Maret, 2016 (DSCA, 2016). Proses yang harus dilalui untuk mendapatkan rudal tersebut sama seperti proses pengadaan rudal yang sebelumnya. Selain itu kontraktor yang bertanggung jawab dalam pengadaan rudal tersebut juga sama, yakni Raytheon Missile Systems

Company. Perbedaannya tentu ada pada biaya terkait pembelian rudal tersebut. Hal tersebut di mana biaya keseluruhannya adalah sebesar \$95 juta (DSCA, 2016).

Selain pengadaan jet tempur F-16 C/D Block 52ID beserta persenjataan-persenjataannya, pemerintah Indonesia juga melakukan pengadaan alutsista lainnya yang berkontribusi pada MEF tahap II, yakni 8 unit helikopter tempur AH-64E Apache Guardian baru. Dalam pengadaan ini proses yang dijalani oleh pemerintah Indonesia dilakukan melalui skema program FMS, yang mana bermula pada tahun 2012 sebagaimana telah dinyatakan oleh Sekretaris Deplu AS yakni Hillary Clinton dan Menlu (Menteri Luar Negeri) RI Marty Natalegawa (Suherdjoko, 2018). Selanjutnya tentu DSCA segera memberitahukan permintaan pembelian 8 unit alutsista berupa helikopter tempur AH-64E Apache Guardian tersebut kepada Kongres AS agar disetujui (DSCA, 2012). Perlu diketahui bahwa total biaya keseluruhan helikopter tempur tersebut adalah sebesar \$1,42 miliar, yang mana kontrak tersebut meliputi 8 unit helikopter AH-64E Apache Guardian beserta perlengkapan avionik, teknis, dan persenjataan-persenjataannya yang bersifat PGM yakni 32 Peluncur Rudal Hellfire M299A1; dan 140 Rudal Hellfire AGM-114R3 (DSCA, 2012).

Kontrak pengadaan helikopter AH-64E Apache Guardian tersebut selanjutnya tentu diberikan kepada Boeing selaku perusahaan yang memproduksi helikopter tempur Apache, namun terdapat perusahaan-perusahaan lain yang juga berkontribusi dalam melengkapi peralatan-peralatan pada helikopter tersebut, yakni seperti Lockheed Martin Corporation, General Electric Company, Lockheed Martin Millimeter Technology, dan Longbow Limited Liability Corporation (DSCA, 2012).

Dampak Kerja Sama Pertahanan Indonesia-AS Terhadap Pertahanan Indonesia

Seperti yang diketahui, pengadaan berupa 24 jet tempur F-16 C/D Block 52ID dari AS, yang mana telah dinyatakan dan disetujui oleh kedua belah pihak pada tahun 2014 dan diterima secara bertahap sejak tahun tersebut, telah diterima sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia dan segera bergabung dengan TNI-AU pada tahun 2018. Selain itu perjanjian pengadaan peralatan pertahanan yang telah ditandatangani dari tahun 2013 berupa 8 helikopter tempur AH-64E Apache Guardian juga telah diterima oleh Indonesia secara bertahap mulai dari tahun 2017 hingga 2018 yang mana selanjutnya digabungkan ke dalam TNI-AD. Tentu melalui pengadaan-pengadaan tersebut, pencapaian terhadap MEF tahap II tahun 2015-2019 mengalami peningkatan di mana angka persentase yang didapat oleh pemerintah Indonesia adalah sebesar 63,19%. Dan selain itu, dampak pada pertahanan Indonesia di sepanjang berjalannya MEF tahap II tentu juga terlihat telah mengalami kemajuan, yang mana didapat melalui pengadaan jet tempur F-16 C/D Block 52ID dan helikopter tempur AH-64E Apache Guardian.

Dari pengadaan 24 jet tempur F-16 C/D Block 52ID tersebut, militer Indonesia telah menunjukkan kemampuannya dalam memperluas operasi patroli dan mengikuti berbagai macam latihan. Setelah mendapatkan sejumlah jet tempur F-16 C/D Block 52ID, TNI-AU segera menggelar sebuah latihan untuk mengasah profesionalisme bernama Latihan Puncak yang digelar di sekitar Pulau Natuna yang berdekatan dengan Laut Tiongkok Selatan (LTS), sebuah perairan yang dipenuhi permasalahan sengketa (BBC Indonesia, 2016). Latihan tersebut tentu berdampak terhadap kemampuan pertahanan negara Indonesia, yang mana membantu Indonesia dalam meningkatkan kewaspadaan militernya di sekitar kawasan LTS yang tentunya memiliki ancaman berpotensi tinggi terhadap keamanan Indonesia serta kawasan Asia Tenggara. Selain Latihan Puncak, TNI-AU juga ikut hadir dalam latihan AU multinasional bersama dengan sejumlah negara lainnya yang digelar di Australia bernama Pitch Black pada tahun 2018 (RAAF, t.t.). Tentu dengan diikutinya berbagai macam latihan dan patroli rutin, militer Indonesia yang sempat terpuruk pada masa embargo AS, secara perlahan mulai mengalami peningkatan terhadap kemampuannya.

Pengadaan alutsista lainnya yakni helikopter tempur AH-64E Apache Guardian tentunya juga berdampak pada pertahanan Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa helikopter tempur tersebut tiba pada tahun 2018, yang mana mendekati dengan berakhirnya program MEF tahap II. Dengan hal tersebut, helikopter tempur AH-64E Apache Guardian baru milik TNI-AD tidak banyak mendapatkan pengalaman. Akan tetapi walaupun jam terbang yang dimiliki helikopter tempur tersebut dapat dikatakan masih minim, dalam laporan DSCA terdapat penjelasan tentang tujuan dari digunakannya alutsista tersebut. Menurut laporan DSCA (2012), helikopter tempur AH-64E Apache Guardian yang diakuisisi oleh pemerintah Indonesia akan menjadi aset yang penting dalam melindungi Indonesia dari berbagai macam ancaman keamanan, yang mana helikopter tempur tersebut akan ditugaskan untuk menjalankan operasi anti-terorisme, operasi anti-pembajakan, mengawasi pergerakan di Selat Malaka, dan mengawasi perbatasan negara.

Kesimpulan

Dapat dilihat melalui perspektif neorealisme dari Kenneth Waltz, upaya Indonesia dalam memastikan keamanannya sebagai *security maximizer* telah ditunjukkan melalui diselenggarakannya program MEF demi meningkatkan kemampuan pertahanan ke standar ideal yang telah disetujui dan ditetapkan. Hal tersebut tentu telah dilakukan melalui sejumlah pengadaan alutsista yang didapat dengan cara bekerja sama dengan negara lain. Di dalam MEF tahap II ini, pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan berbagai macam negara terkait pengadaan alutsista berteknologi lebih maju dari alutsista yang dimiliki sebelumnya. Salah satu negara mitra Indonesia dalam bidang pertahanan, yakni AS seperti yang diketahui memiliki kemampuan dalam memproduksi alutsista modern yang mana teknologinya tergabung dalam RMA. Tentu melalui proses yang panjang dan persetujuan dari berbagai macam pihak, upaya modernisasi pertahanan melalui program MEF Indonesia pada akhirnya mulai mengalami peningkatan dengan banyaknya kehadiran peralatan-peralatan pertahanan yang baru. Hal tersebut tentu berdampak pada peningkatan target pada MEF tahap II, di mana yang semulanya pada MEF tahap I adalah sebesar 54,97% meningkat menjadi 63,19%.

Tentu dampak dari adanya peningkatan tersebut dapat dirasakan oleh kemampuan pertahanan Indonesia dalam menjamin keamanan negara. Sebagaimana telah dipaparkan di atas, peralatan-peralatan pertahanan berupa sejumlah jet tempur F-16 C/D Block 52ID dan helikopter tempur AH-64E Apache Guardian beserta dengan persenjataan-persenjataannya, telah diperoleh dan digunakan oleh militer Indonesia untuk terus mengasah kemampuannya melalui latihan-latihan militer serta menjaga keamanan negara dengan rutin melakukan misi patroli. Peralatan-peralatan pertahanan tersebut juga tentunya akan diarahkan ke titik wilayah Indonesia yang tinggi potensi ancaman keamanannya yang mana dapat disebut dengan *flash point*. Dengan hal tersebut, kewajiban militer Indonesia dalam melindungi dan menjamin keamanan negara dapat dijalankan dengan efektif.

Referensi

- Baldwin, D. A. (1997). The concept of security. *Review of international studies*, 23(1), 5-26.
- BBC Indonesia. (2016). *Latihan puncak TNI AU 'tak provokasi' sengketa di dekat Natuna*. Diambil dari [bbc.com: https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/10/161004_indonesia_latihan_natuna](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/10/161004_indonesia_latihan_natuna)
- Cuoco, C. A. (2010). *The Revolution in Military Affairs: Theoretical Utility and Historical Evidence*. Research Institute for European and American Studies, 1-103.

- DASA (DE&C). (n.d.). *Security Assistance*. Diambil dari <https://www.dasadec.army.mil/Security-Assistance/>
- Defense Security Cooperation Agency. (n.d.). *Definition*. Diambil dari dsca.mil: <https://samm.dsca.mil/glossary/military-assistance-program-map>
- Defense Security Cooperation Agency. (n.d.). *Excess Defense Articles (EDA)*. Diambil dari dsca.mil: <https://www.dsca.mil/programs/excess-defense-articles-eda>
- Defense Security Cooperation Agency. (n.d.). *Foreign Military Financing (FMF)*. Diambil dari dsca.mil: <https://www.dsca.mil/foreign-military-financing-fmf>
- Defense Security Cooperation Agency. (n.d.). *Foreign Military Sales FAQ*. Diambil dari dsca.mil: [https://www.dsca.mil/foreign-military-sales-faq#:~:text=The%20FMS%20program%20is%20funded,Department%20of%20Defense%20\(DoD\).](https://www.dsca.mil/foreign-military-sales-faq#:~:text=The%20FMS%20program%20is%20funded,Department%20of%20Defense%20(DoD).)
- Defense Security Cooperation Agency. (2011). *Indonesia – Regeneration and Upgrade of F-16C/D Block 25 Aircraft*. Diambil dari dsca.mil: https://www.dsca.mil/sites/default/files/mas/indonesia_11-48_o.pdf
- Defense Security Cooperation Agency. (2012). *Indonesia – AH-64D Apache Block III Longbow Attack Helicopters*. Diambil dari dsca.mil: https://www.dsca.mil/sites/default/files/mas/indonesia_12-53_o.pdf
- Defense Security Cooperation Agency. (2015). *Indonesia – AIM-9X-2 Sidewinder Missiles*. Diambil dari dsca.mil: https://www.dsca.mil/sites/default/files/mas/indonesia_15-28_o.pdf
- Defense Security Cooperation Agency. (2016). *Indonesia- AIM-120C-7 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles (AMRAAMs)*. Diambil dari dsca.mil: https://www.dsca.mil/sites/default/files/mas/indonesia_15-81.pdf
- Dunlap J, C. J. (2011). The Military-Industrial Complex. *Daedalus*, 135-147.
- Dunne, J. P., & Skonks, E. (2009). The Military Industrial Complex. *Academia*, 1-17
- FOX News. (2015). *U.S. Removes Six-Year Embargo Against Indonesia*. Diambil dari foxnews.com: <https://www.foxnews.com/story/u-s-removes-six-year-embargo-against-indonesia>
- Handaka, Ahmad, I., Sudarya, A., & Widodo, R. (2021). Decision-Making Strategy in Developing the Revolution in Military Affairs (RMA) Index in Indonesia to Support National Defense. *NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal NVEO*, 6081-6096.
- Hartung, W. D., & Washburn, J. (1997). *US Arms Transfers to Indonesia, 1975-1997: Who's Influencing Whom?*. Arms Trade Resource Center, World Policy Institute at the New School for Social Research.
- Hundley, R. O. (1999). *Past Revolutions, Future Transformations. What Can the History of Revolutions in Military Affairs Tell us about Transforming the US Military?*. Santa Monica: RAND Corp.
- Hutton, R. W. (2018). *Jakarta Knows Best: US Defense Policies and Security Cooperation in 1950s Indonesia*. Army Command and General Staff College Fort Leavenworth KS.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (n.d.). *Indonesia-US Bilateral Relations*. Diambil dari kemlu.go.id: https://kemlu.go.id/washington/en/pages/hubungan_bilateral/554/etc-menu
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2012). *Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama*. Diambil dari kemhan.go.id: <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/Permenhan-Nomor-19-Tahun-2012-Lampiran-1.pdf>
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Republik Indonesia. (2019). *Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun 2020-2024*. Diambil dari polkam.go.id:

- <https://polkam.go.id/konten/unggahahan/2021/09/RENSTRA-DEP-IV-2020-2024-POHON-KINERJA.pdf>
- Kusumadewi, A., & Armenia, R. (2016). *Kisah Embargo AS dan Sukhoi Rusia di Balik Jet Tempur RI*. Diambil dari [cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160301150059-20-114600/kisah-embargo-as-dan-sukhoi-rusia-di-balik-jet-tempur-ri](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160301150059-20-114600/kisah-embargo-as-dan-sukhoi-rusia-di-balik-jet-tempur-ri)
- Morrissey, S. (n.d.). *U.S. Lifts Indonesia Arms Embargo*. Diambil dari [armscontrol.org: https://www.armscontrol.org/act/2006-01/us-lifts-indonesia-arms-embargo](https://www.armscontrol.org/act/2006-01/us-lifts-indonesia-arms-embargo)
- Nzeribe, S., & Imam, M. I. (2018). Military industrial Complex: A Catalyst for conflicts and wars. *An Open Access Journal* Vol. 7 (1), 73-81.
- Parameswaran, P. (2015). *The new U.S.-Indonesia strategic partnership after Jokowi's visit: Problems and prospects*. Diambil dari [brookings.edu: https://www.brookings.edu/opinions/the-new-u-s-indonesia-strategic-partnership-after-jokowis-visit-problems-and-prospects/](https://www.brookings.edu/opinions/the-new-u-s-indonesia-strategic-partnership-after-jokowis-visit-problems-and-prospects/)
- Raska, M. (2011). RMA diffusion paths and patterns in South Korea's military modernization. *The Korean Journal of Defense Analysis*, 23(3), 369-385.
- Royal Australian Air Force. (n.d.). *Exercise Pitch Black 2018*. Diambil dari [airforce.gov.au: https://www.airforce.gov.au/news-and-events/events/exercises/exercise-pitch-black-2018](https://www.airforce.gov.au/news-and-events/events/exercises/exercise-pitch-black-2018)
- Steinsson, S. (2014). John Mearsheimer's theory of offensive realism and the rise of China. *E-International Relations*, 6.
- The White House. (2015). *Joint Statement by the United States of America and the Republic of Indonesia*. Diambil dari [obamawhitehouse.archives.gov: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/10/26/joint-statement-united-states-america-and-republic-indonesia](https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/10/26/joint-statement-united-states-america-and-republic-indonesia)
- TNI Angkatan Udara. (2014). *F-16 C/D Block 52ID TNI AU*. Diambil dari [tni-au.mil.id: https://tni-au.mil.id/f-16-cd-block-52id-tni-au/](https://tni-au.mil.id/f-16-cd-block-52id-tni-au/)
- TNI Angkatan Udara. (2014). *Selamat Datang F-16C/D-52ID: Petarung Baru TNI AU*. Diambil dari [tni-au.mil.id: https://tni-au.mil.id/selamat-datang-f-16cd-52id-petarung-baru-tni-au/](https://tni-au.mil.id/selamat-datang-f-16cd-52id-petarung-baru-tni-au/)
- TNI Angkatan Udara. (2014). *Menyimak F-16C/D Fighting Falcon Block 52ID baru TNI AU*. Diambil dari [tni-au.mil.id: https://tni-au.mil.id/menyimak-f-16cd-fighting-falcon-block-52id-baru-tni-au/](https://tni-au.mil.id/menyimak-f-16cd-fighting-falcon-block-52id-baru-tni-au/)
- Toft, P. (2005). John J. Mearsheimer: an offensive realist between geopolitics and power. *Journal of International Relations and Development*, 8(4), 381-408.
- Truman S. H., (1949). *Statement by the President on the Occasion of the Independence of Indonesia*. Diambil dari [presidency.ucsb.edu: https://www.presidency.ucsb.edu/documents/statement-the-president-the-occasion-the-independence-indonesia](https://www.presidency.ucsb.edu/documents/statement-the-president-the-occasion-the-independence-indonesia)
- Zahara, E. L., & N, A, R, M. (2020). *Anggaran Pertahanan Indonesia*. Diambil dari Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI 2020: <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/analisis-ringkas-cepat/public-file/analisis-ringkas-cepat-public-28.pdf>
- .The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, 2020. *Indonesia Successfully Passes the First UN Resolution on Global Solidarity to Overcome COVID-19*. [Online] Available at: <https://kemlu.go.id/portal/en/read/1160/berita/indonesia-successfully-passes-the-first-un-resolution-on-global-solidarity-to-overcome-covid-19#:~:text=%E2%80%8BNew%20York%2C%20United%20States,Nations%20Headquarters%20in%20New%20York> [Accessed 15 Juni 2020].
- UNDP, 2006. *The Human Security Framework and National Human Development Report*, New York: UNDP.
- UNESCAP, 2015. *Global Value Chains, Regional Integration and Sustainable Development: Linkages and Policy Implications. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 71st Session*, 25-29 May.

- UNGA. (2020). Global Solidarity to Fight the Coronavirus Disease (Covid-19). [Online] Available at <https://www.un.org/pga/74/2020/03/30/global-solidarity-to-fight-covid-19/> [Accessed 15 Juni 2020].
- UNIDO, 2019. *UNIDO Manufacturing Profile*. [Online] Available at: <https://stat.unido.org/country-profile/economics> [Accessed 10 August 2019].
- WHO. (2020). Pertanyaan dan Jawaban Terkait Coronavirus. [Online] Available at: <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public> [Accessed 17 Mei 2020].
- WHO. (2020). *WHO Director General's Opening Remarks at the Media Briefing on COVID-19 – 11 May 2020*. [Online] Available at: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-may-2020> [Accessed 17 Mei 2020].
- Yuilyana. (2020). *Korea Selatan Berikan Bantuan Bertahap Untuk Indonesia Atasi Pandemi Corona*. [Online] Available at: <https://www.kompas.tv/article/75278/korea-selatan-berikan-bantuan-bertahap-untuk-indonesia-atasi-pandemi-corona>